

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya maka buku Statistik Hasil Pengawasan Tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Buku Statistik Pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan buku yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengawasan antara lain jumlah temuan, rekomendasi, tindak lanjut meliputi per aspek kode, per rincian, informasi pengawasan lainnya disamping juga menampilkan profil Inspektorat.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada berbagai pihak atas terwujudnya penyusunan Statistik Pengawasan Tahun 2019. Kami menyadari bahwa penyusunan buku Statistik ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan.

Semoga laporan Statistik Pengawasan Tahun 2019 ini dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna data dan dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terutama pada sisi perencanaan pada tahun berikutnya

Yogyakarta,
Inspektur Inspektorat

Drs. MARYOTO, MM
NIP. 19610801 198503 1 010

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penilaian tugas pengawasan disusunlah statistik hasil pengawasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta selama 3 tahun dari 2016 sampai 2018.

I.2 Profil Inspektorat

Inspektorat Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta. Inspektorat Kota Yogyakarta adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tahun 2011 BPKP melakukan Penilaian Tata Kelola APIP dan nilai yang didapat pada level 1 dan untuk meningkatkan level menjadi level 2, Inspektorat melakukan self assessment dengan didampingi oleh BPKP Pusat dengan acara FGD dan setelah menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan maka pada Tahun 2012 Nilai Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi level 2.

Pada Tahun 2014 dilakukan evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP oleh BPKP Perwakilan Kota Yogyakarta Nomor LEV-112/PW12/6/2015 tanggal 22 Mei 2015 dengan hasil berada pada Level 2 (Infrastruktur) dengan catatan perbaikan. Elemen yang masih perlu perbaikan adalah :

1. Elemen Peran dan Layanan.
2. Elemen Praktik Profesional.

Pada tahun 2016 dilakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 oleh BPKP Perwakilan DIY dengan LHE Nomor LEV – 132/PW12/3/2016 tanggal 21 April 2016 dengan hasil Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada Level "**terdefinisi**" (level 3) atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Hasil Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "**3,33**".

Pada Tahun 2018 kembali dilakukan evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP oleh BPKP Perwakilan Kota Yogyakarta dengan hasil berada pada Level 3 (Infrastruktur) dengan catatan perbaikan. Elemen yang masih perlu perbaikan adalah :

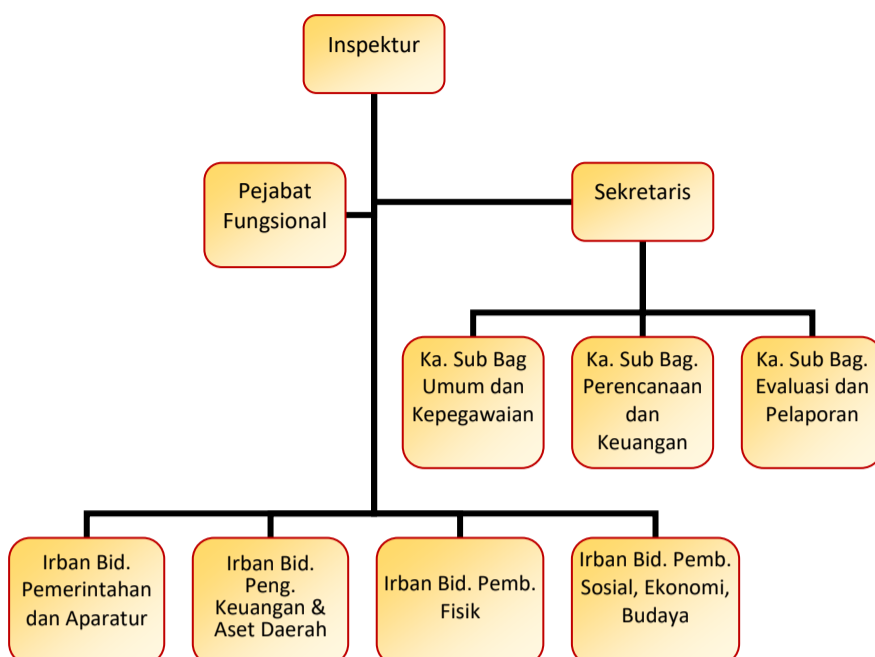
2. Elemen Sumber Daya Manusia.
3. Elemen Praktik Profesional.

I.2.1 Susunan Organisasi Inspektorat

Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Analis Tata Usaha
 - 2) Pengadministrasi Umum
 - 3) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 - 5) Petugas Keamanan
 - 6) Pramur Bakti
 - 7) Pengemudi
 - 8) Pramur Kebersihan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Bendahara
 - 2) Verifikator keuangan
 - 3) Pengolah Data Laporan Kas
 - 4) Pengelola Gaji
 - 5) Pengadministrasi Keuangan
 - 6) Analis Rencana Program dan Kegiatan
 - 7) Pengelola Akuntansi
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
 - 3) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan
2. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
3. Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
4. Irban Bidang Pembangunan Fisik
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
5. Irban Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gbr I.2.1.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

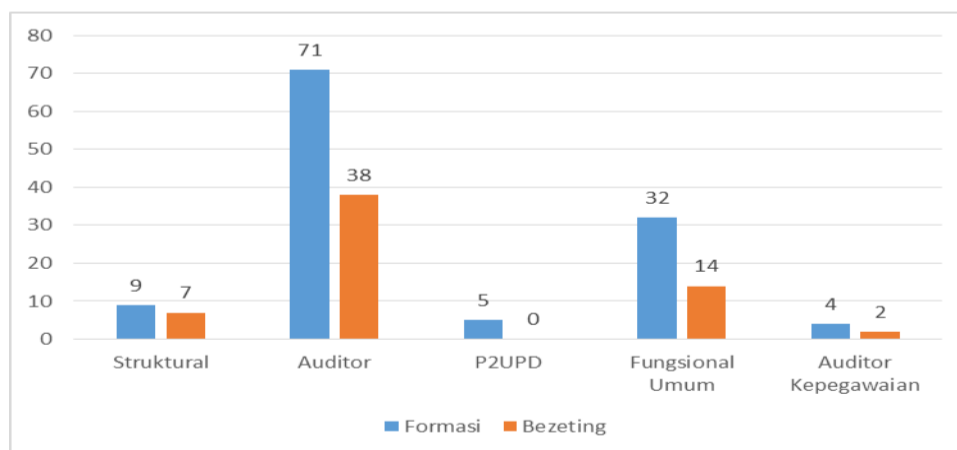


I.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Inspektorat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang PNS dan 1 (satu) orang Tenaga Bantuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2019

No	Jabatan	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	9	7	14.29
2	Auditor	71	38	51.02
3	P2UPD	5	0	0.00
4	Fungsional Umum	32	14	32.65
5	Auditor Kepegawaian	4	2	0.00
	Jumlah	121	61	100.00



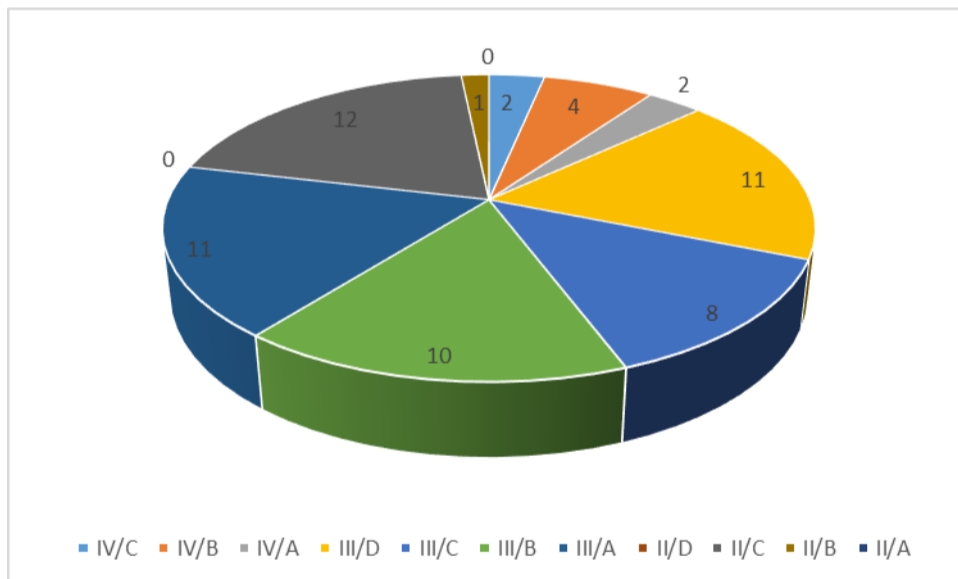
Grafik I.2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2019

Tabel I.2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	28
2.	Perempuan	33
Jumlah		61

Tabel I.2.2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2019

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	2	2.08
2.	Pembina Tingkat 1	(IV/b)	4	10.42
3.	Pembina	(IV/a)	2	4.17
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	11	20.83
5.	Penata	(III/c)	8	16.67
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)	10	18.75
7.	Penata Muda	(III/a)	11	12.50
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	0	2.08
9.	Pengatur	(II/c)	12	8.33
10.	Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)	1	0.00
11.	Pengatur Muda	(II/a)	0	4.17
		Jumlah	61	100.00



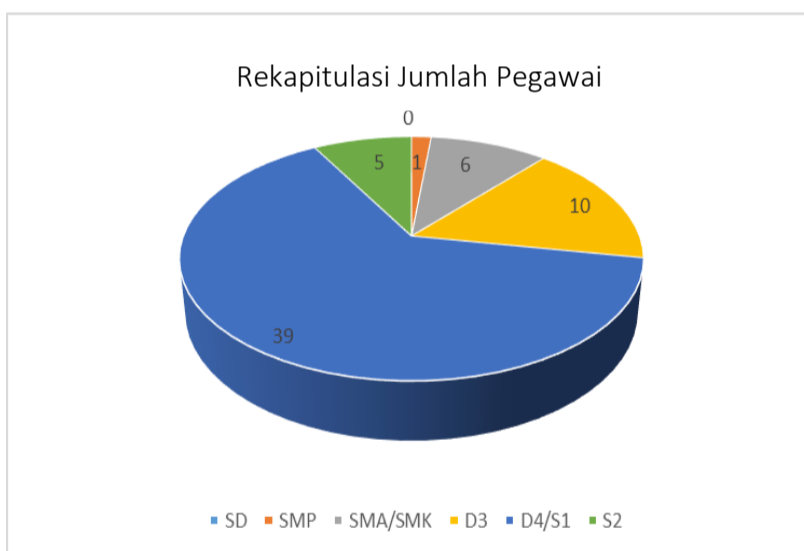
Grafik I.2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2019



Gb.I.2.2.1. Apel Pagi Pegawai Inspektorat

Tabel I.2.2.4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2019

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	2,08
2	SMP	1	2,08
3	SMA/SMK	6	14,58
4	D3	10	6,25
5	D4/S1	39	66,67
6	S2	5	8,33
	Jumlah	61	100



Grafik I.2.2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2019

Dalam melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, Inspektorat Kota Yogyakarta telah melaksanakan kerjasama dengan penyedia jasa, yaitu :

1. Pemelihara Kebersihan : 2 orang
2. Penjaga Keamanan : 3 orang

Tabel 1.2.2.5 Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2019

No	Jabatan	Jumlah	%
1	CPNS Auditor	16	
1	Pelaksana	1	4.00
2	Pelaksana Lanjutan	1	4.00
3	Penyelia	0	4.00
4	Pertama	8	36.00
5	Muda	10	36.00
6	Madya	4	16.00
	Jumlah	40	100

Prosentasi perlu disesuaikan dengan data yang ada

Secara rutin Inspektorat mengadakan pelatihan maupun bimtek dalam upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2019 sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 1.2.2.6 Jenis, Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan Peningkatan SDM APIP per 31 Desember 2018

No	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Peserta
1	Diklat Kepemimpinan			
2	Diklat Fungsional			
3	Diklat Teknis Substansi			
4	Diklat Teknis lainnya			
	Ujian Ulang Uji Sertifikasi Auditor	31 Januari s.d. 1 Februari 2019	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing Jakarta	1. Hastanti, SE 2. Farid Rahmanto, SH
	Diklat IT Forensik	13 Februari s.d. 15 Februari 2020	BPKP Perwakilan DIY	1. Agam Cahyanto M, SE 2. Hastanti, SE 3. Agung Idwan H, SH 4. Sutrisno, SE 5. Novita, SE.,MPA 6. Yohanna P Sari, ST, M.Eng 7. Nurhadiyanta, SE 8. Esti Rahayu Apriyanti, SE 9. Mei Nurningsih, SE 10. Erna susila, SE 11. Farid Rahmanto, SH 12. Dhani Dwi astuti, SE., MA 13. Agus Widodo, ST 14. Ahmad Islahuddin, SH
	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	16 Oktober s.d. 17 Oktober 2019	Kantor BKPP Kota Yogyakarta	1. V. Agus Ribiyanto 2. Yohanes Yosef Wea
	Diklat Audit	8 April s.d. 12	BPSDM Kemendagri Jakarta	1. Ika Anggitasari,SIP

No	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Peserta
	Investigatif	April 2019		2. Rio Dicky Andreanto, SH
	Diklat manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	17 Juni s.d. 21 Juni 2019	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor	1. Agam Cahyanto M, SE
2. Farid Rahmanto, SH				
3. Teddy Widyanto, ST				
4. Ari Sugiarto				
	Diklat Audit Tingkat Dasar	8 Juli s.d. 12 Juli 2019	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor	1. Andi Sistioko M.,A.Md
	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	15 Juli s.d. 19 Juli 2019	New Ayuda, Jl. Salak No. 8 Sempur Babakan bogor	1. Esti Rahayu Apriyanti, SE
2. Agus Widodo, ST				
	Diklat Audit Intern Berbasis Risiko	15 Juli s.d. 19 juli 2019	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor	1. Novita, SE.,MPA
2. Erna susila, SE				
3. Abner Bernard Armadani, S.Kom				
4. Rio Dicky Andreanto, SH				
	Diklat Manajemen Risiko organisasi Sektor Publik	22 Juli s.d. 26 Juli 2019	New Ayuda, Jl. Salak No. 8 Sempur Babakan bogor	1. Hastanti, SE
2. Agung Idwan H, SH				
3. Mei Nurningsih, SE				
4. Nurhadiyanta, SE				
5. Dhani Dwi astuti, SE., MA				
6. Ahmad Islahuddin, SH				
	Diklat Audit Intern Berbasis Risiko	2 September s.d. 6 September 2019	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor	1. Agus Widodo, ST
2. Siwi Catur Nugraha, SE				
3. V. Agus Ribiyanto				
4. Andi Sistioko M.,A.Md				
	Probitas Audit	28 November s.d. 29 November 2020	Hotel Cakra Kembang	1. Agam Cahyanto M, SE
2. Hastanti, SE				
3. Agung Idwan H, SH				
4. Sutrisno, SE				
5. Novita, SE.,MPA				
6. Yohanna P Sari, ST, M.Eng				
7. Nurhadiyanta, SE				
8. Esti Rahayu Apriyanti, SE				
9. Mei Nurningsih, SE				
10. Erna susila, SE				
11. Farid Rahmanto, SH				
12. Dhani Dwi astuti, SE., MA				
13. Agus Widodo, ST				
14. Ahmad Islahuddin, SH				
5	Pelatihan di Kantor Sendiri			
	Fraud Audit	26 Maret 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Hastanti, SE Farid Rahmanto, SH

No	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Peserta
	Audit Investigasi	30 April 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Rio Dicky Andreanto, SH Ika Anggitasari, S.Ip
	Resiko Organisasi Sktor Publik	27 Juli 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Agam Cahyanto M, SE Farid Rahmanto, SH Teddy Widiyanto, ST
	Kendali Mutu Audit	30 Juli 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Novita, SE, MPA Erna Susila, SE Abner Bernard A., S.Kom
	Bukti Audit	12 Desember 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Farid Rahmanto, SH
	Pengawasan Pengelolaan SDM	13 Desember 2019	RR. Bathara Wisnu Lt. 3 Inspektorat Kota YK	Hastanti, SE

Gb. 1.2.2.2 Pelatihan Kantor Sendiri



I.2.3 Sarana dan Prasarana

Inspektorat Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Kenari No. 51 Yogyakarta dengan luas tanah 730 m² terdiri bangunan 1.176 m².

Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yaitu:

Tabel I.2.3.1 Profil Sarana Prasarana per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 2	13 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	6 unit	Baik
3.	Handycam	2 buah	Baik
4.	LCD Proyektor	3 buah	Baik
5.	Camera Digital	4 buah	Baik
6.	Rollmeter	3 buah	Baik
7.	Scaner	3 unit	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
8.	Komputer	25 unit	Baik
9.	Printer	22 unit	Baik
10.	Lap Top	24 unit	Baik
11.	Pengukur ketebalan besi	1 buah	Baik
12.	Checker perhitungan	2 buah	Baik
13.	Pengukur test beton	2 buah	Baik
14.	Telephone PABX LG	2 buah	Baik
15.	Meteran Laser	4 buah	Baik
16.	Telephone SLJJ Word phone	1 buah	Baik
17.	Mesin penghancur kertas	2 buah	Baik
18.	Tablet	1 buah	Baik
19.	Voice recorder	1 buah	Baik
20.	Whiteboard 2 muka	1 buah	Baik
21.	Wireles	2 buah	Baik
22.	Air Purifyer	2 buah	Baik
23.	Meja kubikal	24 unit	Baik
24.	Kursi kerja	36 buah	Baik
25.	Sepeda	1 unit	Baik
26.	Scaner portable	4 buah	Baik
27.	Genset	1 buah	Baik

I.2.4 Perencanaan

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari perencanaan jangka menengah tahun 2017 – 2022.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta memuat Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan”

b. Misi

Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan karena Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan.

Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan
- c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.

- d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-7.

c. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Inspektorat dirumuskan :
Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan uraian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3,4

d. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2017 yang ditetapkan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah Kepatuhan auditan (*stakeholder*) terhadap hasil pengawasan meningkat dengan uraian sasaran indikator Prosentase (%) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan 80%

Tabel 1.2.4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD	Misi ke-7	Tujuan	Sasaran
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Kepatuhan auditan (<i>stakeholder</i>) terhadap hasil pengawasan meningkat.

e. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diimplementasikan menjadi 9 program dan 15 kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur

VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
- 2 Review Pengadaan Barang dan Jasa

VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Pengawasan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
- 2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja

IX. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan pengawasan Inspektorat dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berisi : Obyek Pemeriksaan, hari Pemeriksaan, Jenis Pemeriksaan, Jadwal/Tata kala, Tim Pemeriksaan, dan rencana anggaran

I.2.5 Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel I.2.5.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 - 2019

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2017	7.018.820.671	6.616.836.735,74	92,74
2	2018	5.103.110.829	4.771.863.982,66	93,51
3	2019	5.837.657.205	5.547.309.484,78	95,03

**Tabel I.2.5.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 - 2019
(Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)**

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	Belanja Tidak Langsung	3.302.447.203	3.180.474.681	96,31
	Belanja Langsung	3.716.373.468	3.436.352.054,74	92,74
2018	Belanja Tidak Langsung	3.231.105.119	3.080.088.799	95,33
	Belanja Langsung	1.872.005.710	1.691.775.183,66	90,37
2019	Belanja Tidak Langsung	3.726.299.708	3.589.659.462	96,33
	Belanja Langsung	2.111.357.497	1.957.650.022,78	92,72

Tabel I.2.5.3 Perbandingan Anggaran Inspektorat dengan APBD Tahun 2016 – 2019

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Inspektorat (Rp)	APBD (Rp)	Prosentase (%)
1	2016	5.849.877.003	1.800.707.338.425	0,32
2	2017	7.018.820.671	1.666.195.785.675	0,42
3	2018	5.103.110.829	1.795.669.529.194	0,28
4	2019	5.547.309.485,78	1.943.940.157.146,52	0,29

BAB II HASIL PENGAWASAN

II.1 Audit Operasional

adalah audit yang dilaksanakan secara komprehensif dengan ruang lingkup meliputi 4 (empat) aspek yaitu :

1. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi dan Kinerja
2. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Aspek Pengelolaan Keuangan
4. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Audit dilakukan dengan tujuan:

1. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program pembangunan;
3. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa.

Obyek audit operasional adalah SKPD beserta unit kerja teknis di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta.

Tabel II.1.1 Jumlah Obyek Audit Operasional/Kinerja Tahun 2017 – 2019

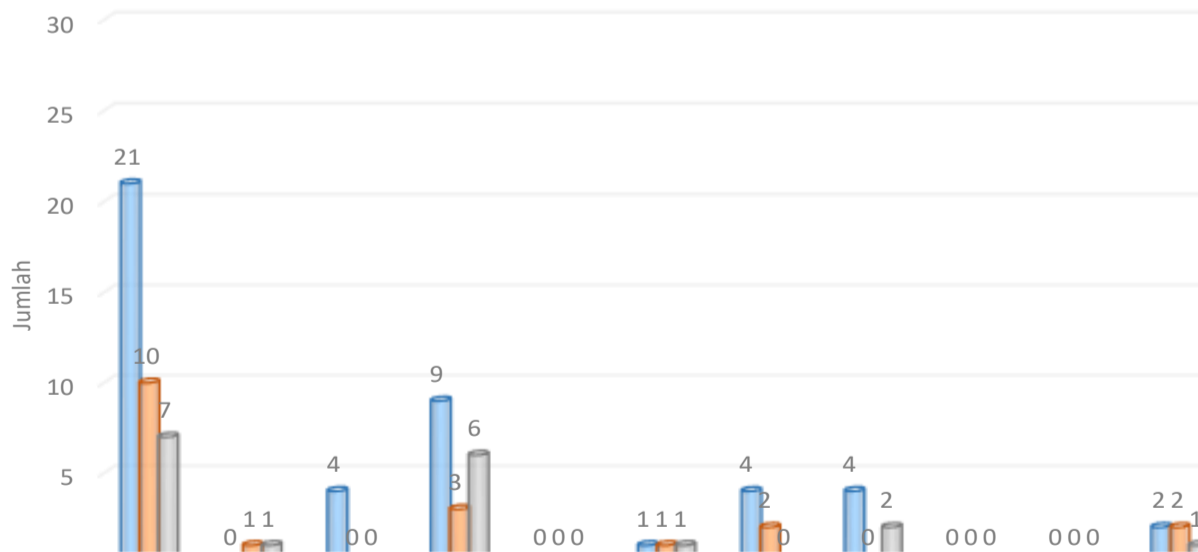
Tahun	Jumlah
2017	40
2018	40
2019	27

Temuan audit diidentifikasi kedalam beberapa kategori diantaranya yaitu berdasarkan kode temuan, aspek pemeriksaan, temuan bersifat finansial/dapat dinilai uang, kelompok penyebab, dan sifat rekomendasinya.

**Tabel II.1.2 Kelompok Temuan Audit Operasional
Tahun 2017 – 2019**

No	Temuan			Jumlah		
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019
1	1		Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	34	14	14
2		01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	21	10	7

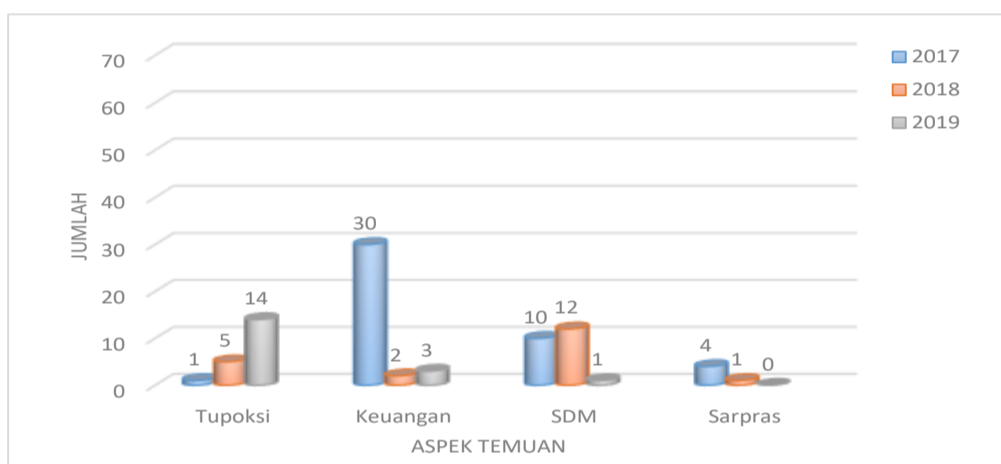
No	Temuan			Jumlah		
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019
3		02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	-	1	1
4		03	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	4	-	-
5		04	Administrasi	9	3	6
6		05	Indikasi tindak pidana	-	-	
7	2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		9	3	3
8		01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1	1	1
9		02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	4	2	-
10		03	Kelemahan struktur pengendalian intern	4	-	2
11	3	Temuan 3E		2	2	1
12		01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	-	-	
13		02	Ketidakefisienan	-	-	
14		03	Ketidakefektifan	2	2	1
		Total		45	19	18



Grafik II.1.1 Kelompok Temuan Audit Operasional Tahun 2017 -2019

Tabel II.1.3 Aspek Temuan Audit Operasional Tahun 2017 - 2019

No	Aspek Pemeriksaan	Tahun					
		2017		2018		2019	
1	Aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi	1	2,22%	5	26,32 %	14	77,77 %
2	Aspek pengelolaan keuangan	30	66,67 %	2	10,53 %	3	16,66 %
3	Aspek pengelolaan sumber daya manusia	10	22,22 %	12	63,16 %	1	5,55 %
4	Aspek pengelolaan sarana dan prasarana	4	8,89%	1	5,26%	0	0
Total		45		19		18	



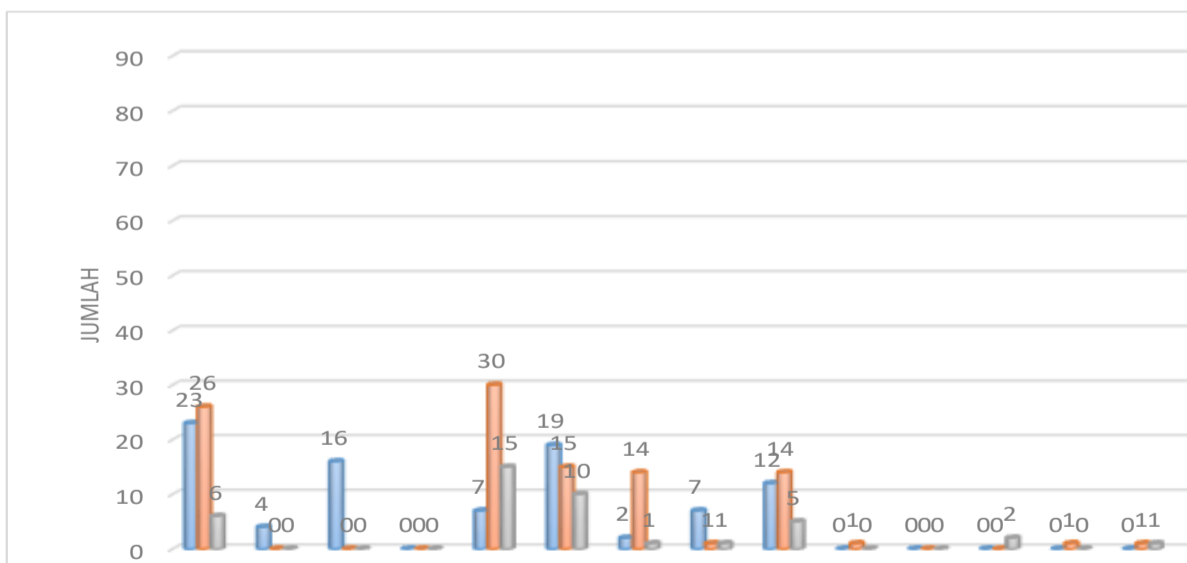
Grafik II.1.2 Aspek Temuan Audit Operasional Tahun 2017 -2019

Tabel II.1.4 Temuan Audit Operasional Bersifat Finansial/dapat Dinilai Uang Tahun 2017 -2019 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Kerugian negara/ daerah	105.987.507,41	29.652.772,00	34.386.900,63
2	Kewajiban setor kepada negara/daerah	-	-	-
Total		105.987.507,41	29.652.772,00	34.386.900,63

Tabel II.1.5 Kelompok Rekomendasi Temuan Audit Operasional Tahun 2017 - 2019

No	Kode	Deskripsi	Jumlah		
			2017	2018	2019
1	01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	26	10	6
2	02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	0	1	0
3	03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0	0
4	04	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0	0
5	05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	30	7	15
6	06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	15	3	10
7	07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	14	3	1
8	08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	2	1
9	09	32	14	8	5
10	10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	1	0	0
11	11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	0	0
12	12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	2
13	13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0	0
14	14	Lain-lain	0	0	1
Total			90	34	41



Grafik II.1.3 Kelompok Rekomendasi Temuan Audit Operasional Tahun 2017 - 2019

II.2 Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Kinerja, antara lain Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, Audit Bersifat Khusus/Investigatif/ Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (Auditi) atau yang bersifat khas. Pemeriksaan khusus berkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

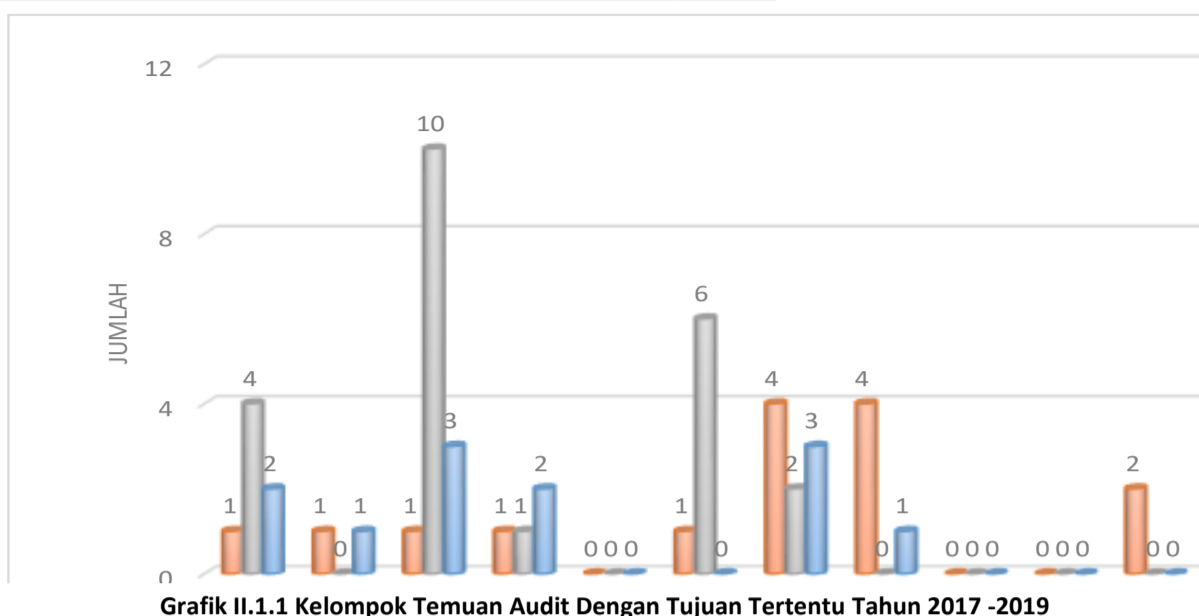
a. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Tematik

Tabel II.2.a.1 Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017 - 2019

Tahun	Jumlah Audit
2017	22
2018	22
2019	18

Tabel II.2.a.2) Kelompok Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Tahun 2017 - 2019

No	Temuan			Jumlah			
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019	
1	1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan					
2		01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1	4	2	
3		02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1	-	1	
4		03	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	10	3	
5		04	Administrasi	1	1	2	
6		05	Indikasi tindak pidana	-	-	0	
7	2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
8		01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	6	0	
9		02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	2	3	
10		03	Kelemahan struktur pengendalian intern	-	-	1	
11	3	Temuan 3E					
12		01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	-	-	0	
13		02	Ketidakefisienan	-	-	0	
14		03	Ketidakefektifan	-	-	0	
		Total		4	23	12	



Tabel II.2.a.3) Aspek Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu

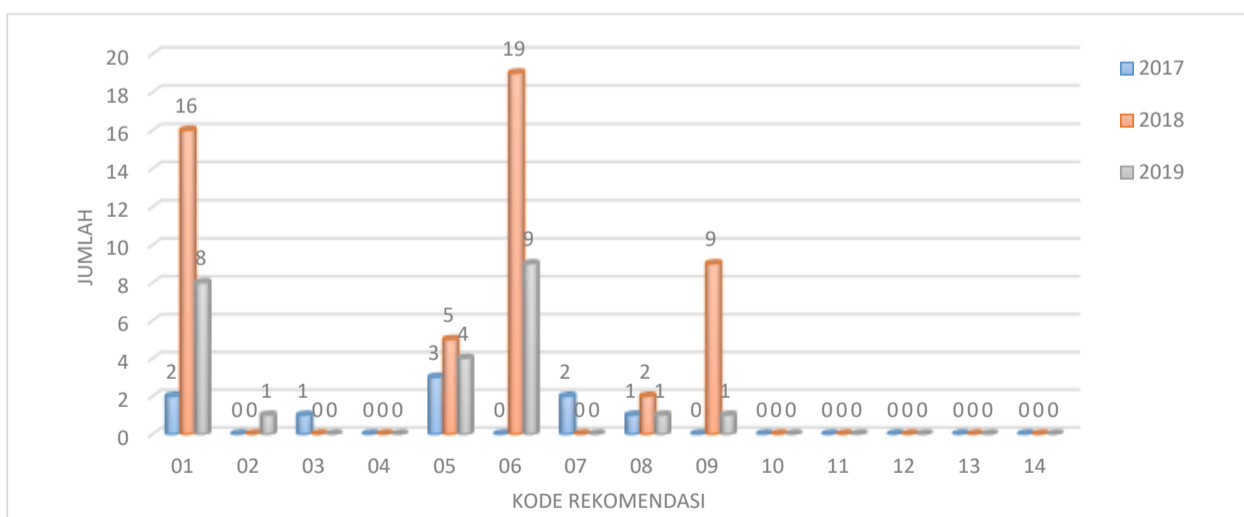
No	Aspek Audit	Tahun 2017		Tahun 2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi	5	22,73	-	-	5	42
2	Aspek pengelolaan keuangan	13	59,09	5	21,74	6	50
3	Aspek pengelolaan sumber daya manusia	-	-	16	69,56	-	-
4	Aspek pengelolaan sarana dan prasarana	4	18,18	2	8,70	1	8
	Total	22	100	23	100	12	100

Tabel II.2.a.4) Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersifat Finansial/dapat Dinilai Uang Tahun 2019 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	2019
1	Kerugian negara/ daerah	3,929,218.00	131.050.880,00	245.483.709
2	Kewajiban setor kepada negara/daerah	-	-	-
	Total	3,929,218.00	131.050.880,00	245.483.709

Tabel II.2.a.5) Kelompok Rekomendasi Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2017 – 2019

No	Kode	Deskripsi	Jumlah		
			2017	2018	2019
1	01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	2	16	8
2	02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	-	-	1
3	03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	1	-	-
4	04	Penghapusan barang milik negara/daerah	-	-	-
5	05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	3	5	4
6	06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	-	19	9
7	07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	2	-	-
8	08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	2	1
9	09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	-	9	1
10	10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	-
11	11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	-	-	-
12	12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	-	-	-
13	13	Pelaksanaan sosialisasi	-	-	-
14	14	Lain-lain	-	-	-
Total			9	51	24



Grafik II.1.3 Kelompok Rekomendasi Temuan ADTT Tematik Tahun 2017 – 2019

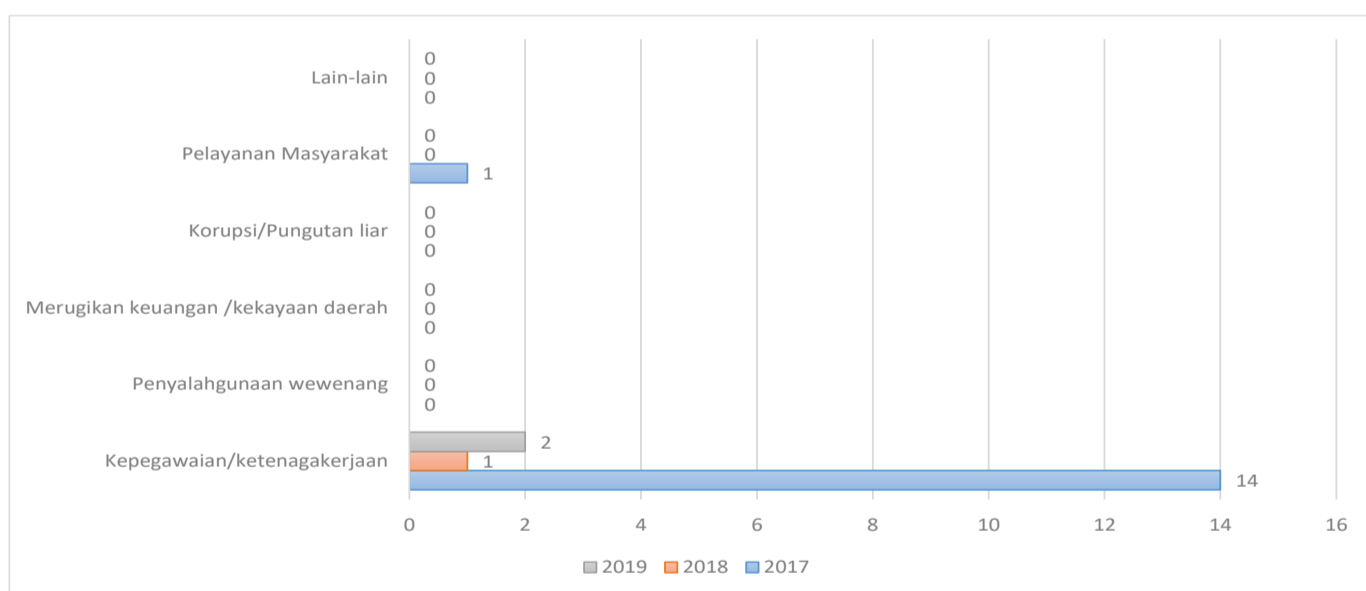
b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Kasus

Tabel II.2.b.1) Jumlah ADTT Kasus

Tahun	Jumlah Audit
2017	15
2018	1
2019	2

Tabel II.2.b.2) Pokok Permasalahan Audit Dengan Tujuan Tertentu Kasus Tahun 2017 - 2019

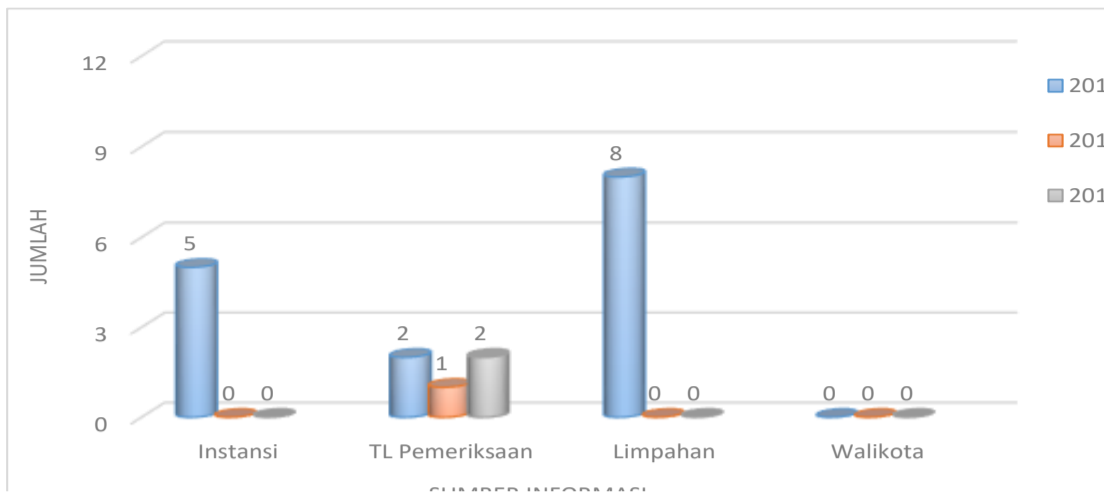
	ADTT Khusus/Kasus	2017	2018	2019
1	Kepegawaian/ketenagakerjaan	14	1	2
2	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
3	Merugikan keuangan /kekayaan daerah	-	-	-
4	Korupsi/Pungutan liar	-	-	-
5	Pelayanan Masyarakat	1	-	-
6	Lain-lain	-	-	-
	Total	15	1	2



Grafik II.2.b.2) Pokok Permasalahan ADTT Kasus Tahun 2019

Tabel II.2.b.3) Sumber Informasi ADTT Kasus Tahun 2017 -2019

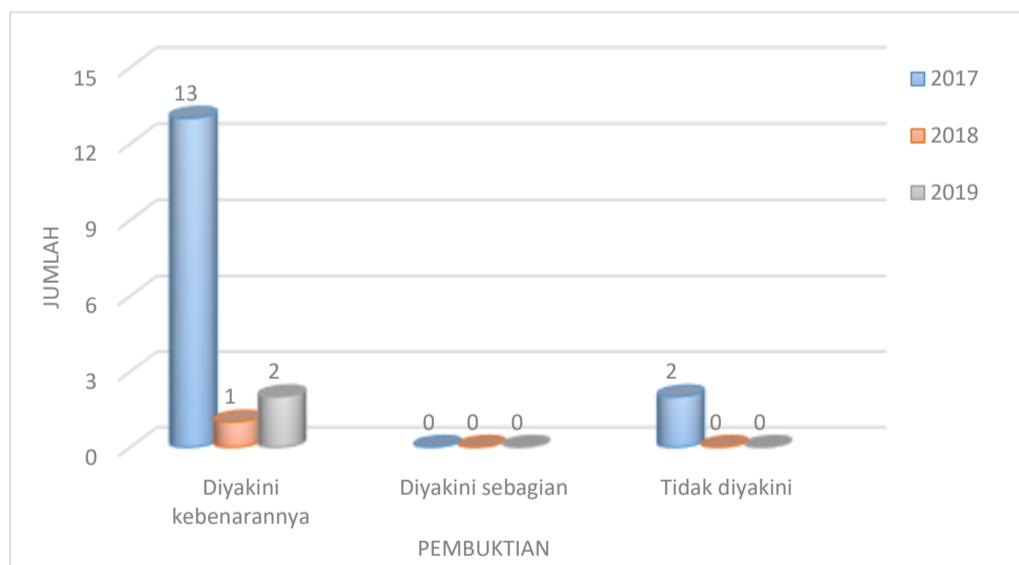
No	Sumber Informasi	2017	2018	2019
1	Permintaan/Laporan Kepala Instansi	5	0	0
2	Tindak Lanjut Penelitian dan Penelaahan Informasi/ Pengembangan Pemeriksaan Reguler/Hasil Inspeksi	2	1	2
3	Limpahan Pemeriksa Lain	8	0	0
4	Perintah langsung Walikota	0	0	0
	Total	15	1	2



Grafik II.2.b.3) Sumber Informasi ADTT Kasus Tahun 2017 -2019

Tabel II.2.b.4) Pembuktian ADTT Kasus Tahun 2017 - 2019

No	Status Simpulan/Pembuktian	Tahun			Keterangan
		2017	2018	2019	
1	Diyakini kebenarannya	13	1	2	Direkomendasikan hukuman disiplin
2	Diyakini sebagian	0	0	0	Dilakukan pembinaan
3	Tidak diyakini kebenarannya	2	0	0	Tidak dikenai sanksi
Total		15	1	2	



Grafik II.2.b.4) Pembuktian ADTT Kasus Tahun 2016 - 2019

II. 3. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Nomor 40

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan reuiu laporan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.3.1 Hasil Evaluasi atas SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

Tahun Reuiu	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Ket
	Predikat	Nilai	
2017	BB	71,95	Sangat baik
2018*)	BB	75,01	Sangat baik
2019	A	80,03	Memuaskan

*) Evaluasi oleh Inspektorat DIY an. Kemenpan

II.4 Reuiu Laporan Keuangan

Reuiu Laporan Keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas merupakan target pemerintah yang telah berkomitmen kuat untuk mendapatkan opini “unqualified” atau “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Tujuan Reuiu Laporan Keuangan adalah:

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan daerah maupun SKPD, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Reuiu Laporan Keuangan dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu reuiu terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan semester I tahun berjalan. Reuiu Laporan Keuangan telah dilaksanakan selama 11 (sebelas) tahun yaitu sejak 2008. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak LKPD tahun 2009-2018 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel II.4.1 Hasil Reuiu Laporan Keuangan Tahun 2017 - 2019

Tahun Reuiu	Hasil Reuiu		Opini
	Akhir Tahun Sebelumnya	Semester I	
2017	1 LKPD th. 2016	1 LKPD sem 1 th 2016 5 LK SKPD sem 1 th. 2016	WTP
2018	1 LKPD th. 2017	1 LKPD sem 1 th 2017 5 LK SKPD sem 1 th. 2017	WTP
2019	1 LKPD th. 2018	1 LKPD sem 1 th 2018 5 LK SKPD sem 1 th. 2018	WTP

II.5 Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah

Reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*. Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong perangkat daerah agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan reviu dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Fungsi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD serta Musrenbang, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah sehingga dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2019, reviu dilakukan terhadap dokumen RKPD Perubahan 2019, Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2019, RKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Reviu RKPD dilakukan dengan penelaahan kesesuaian penyusunan dokumen RKPD yang bersifat tahunan dengan RPJMD dan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa dokumen RKPD telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II.5.1 Hasil Reviu RKA

Tahun Reviu	Hasil Reviu	
	RKPA tahun berjalan	RKA tahun depan
2017	51 RKPA SKPD Tahun 2017	51 RKA SKPD Tahun 2018
2018	51 RKPA SKPD Tahun 2018	51 RKA SKPD Tahun 2019
2019	51 RKPA OPD Tahun 2019	51 RKA OPD Tahun 2019

II.6 Reviu Penyerapan Anggaran

Reviu Penyerapan Anggaran dilaksanakan untuk mengetahui jumlah capaian serapan/anggaran, realisasi belanja serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran per triwulan. Selama tahun 2017, 2018 dan 2019 Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV tahun sebelumnya, bulan April atas realisasi Triwulan I tahun berjalan, bulan Juli atas realisasi Triwulan II tahun berjalan dan bulan Oktober atas realisasi Triwulan III tahun berjalan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.6.1 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran

Tahun Reviu	Realisasi Penyerapan Anggaran			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2017	92,34%	11,19%	31,15%	41,66%
2018	88,18%	12,36%	33,93%	59,81%
2019	91,19 %	12,01 %	32,35 %	52,81 %

Mulai tahun 2018 Triwulan I sudah mulai menggunakan skoring atas 4 variabel yaitu :

1. Alokasi dan realisasi Belanja
2. Ketepatan waktu
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. Efisiensi dan efektivitas

Tabel II. 6. 1 Hasil Skoring Reviu Penyerapan Anggaran

Tahun Reviu	Skoring			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2018	0	60,83 (Cukup)	66, 70 (Cukup Baik)	80,91 (Baik)
2019	83,12 (Baik)	82,81 (Baik)	81,80 (Baik)	76,06 (Baik)

II.7 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dilakukan untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan PBJ pada unit kerja teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama yang dilakukan melalui lelang/tender apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tujuan reviu PBJ adalah:

- a) Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang jasa dan belanja modal setiap tribulan.
- b) Mengetahui jumlah atau posisi belanja barang jasa dan belanja modal yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang lelang, ditandatangani kontrak dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir tribulan.
- c) Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan pelaksanaan PBJ.

Selama tahun 2018, Reviu PBJ dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV tahun 2017, bulan April atas realisasi Triwulan I tahun 2018, bulan Juli atas realisasi Triwulan II tahun 2018 dan bulan Oktober atas realisasi Triwulan III tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.7.1 Hasil Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun	Realisasi PBJ Sudah Dilelang			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2017	88,16%	26,57%	54,94%	88,54%
2018	92,36%	16,36%	56,25%	87,10%

2019	98,59 %	18,24 %	42,21 %	89,02 %
-------------	---------	---------	---------	---------

II.8 Reviu Capaian Kinerja

Reviu Capaian Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode pelaksanaan reviu dengan membandingkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja terhadap dokumen perencanaan, RPJMD, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama terhadap data pendukungnya.

Selama tahun 2019 reviu laporan kinerja dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV, bulan April atas realisasi triwulan I, bulan Agustus atas realisasi triwulan II dan bulan Oktober atas realisasi triwulan III. Dokumen yang direviu adalah hasil pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta setiap triwulan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi.

II.9 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan untuk:

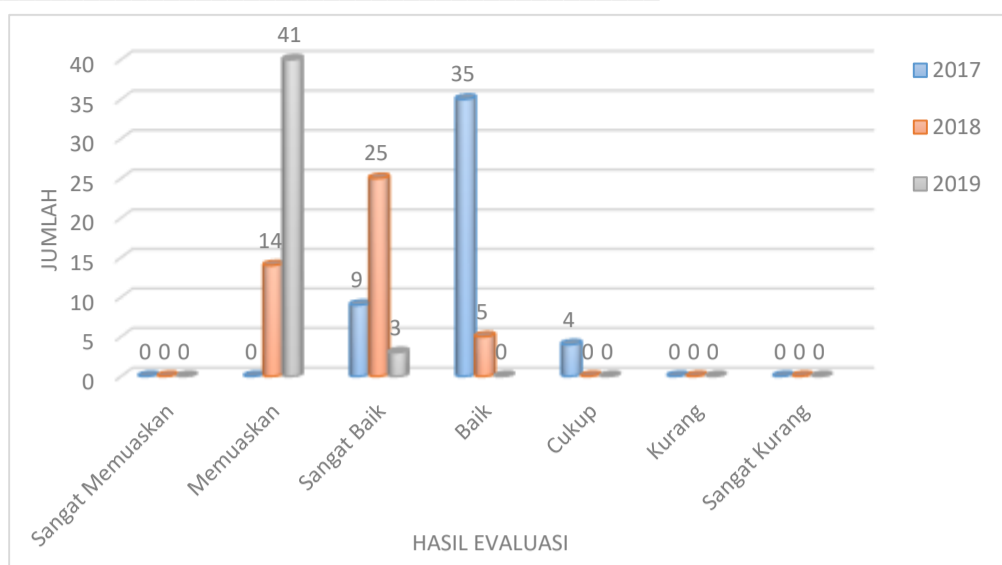
1. Mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan sistem AKIP meliputi:
 - a. Memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi sistem AKIP
 - b. Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan sistem AKIP
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan implementasi sistem AKIP
2. Menilai kinerja SKPD, khususnya:
 - a. Menginformasikan kinerja SKPD
 - b. Memberikan rekomendasi konstruktif guna peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Pada Tahun 2016 terdapat perubahan pedoman evaluasi SAKIP dari Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 diubah menjadi Permenpan Nomor 12 Tahun 2015.

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.9.1 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 - 2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	2019
Jumlah instansi yang dievaluasi	48	44	44
Hasil Evaluasi			
Sangat Memuaskan (AA)	0	0	0
Memuaskan (A)	0	14	41
Sangat Baik (BB)	9	25	3
Baik (B)	35	5	0
Cukup (CC)	4	0	0
Kurang (C)	0	0	0
Sangat Kurang (D)	0	0	0



Grafik II.9.1 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2017 – 2019

II.10 Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan PBJ selain dilakukan melalui kegiatan audit, reviu dan evaluasi, juga melalui monitoring. Kegiatan Monitoring PBJ dilakukan pada paket pengadaan barang jasa tertentu yang tidak tersampling dalam kegiatan audit operasional, audit dengan tujuan tertentu maupun evaluasi PBJ. Monitoring PBJ dilakukan pada triwulan IV tahun anggaran untuk mengukur capaian keterlaksanaan suatu paket pengadaan barang jasa yang disinyalir ada permasalahan, untuk mengukur tingkat keterselesaiannya sebelum tahun anggaran berakhir.

Tabel II.10.1 Target dan Realisasi Monitoring PBJ Tahun 2017 - 2019

Tahun	Target	Realisasi
2017	5 laporan	5 laporan
2018	4 laporan	4 laporan
2019	4 laporan	5 laporan

II.11 Monitoring Kepatuhan Jam Kerja

Monitoring kepatuhan jam kerja dilakukan dalam rangka mengukur tingkat kedisiplinan PNS dalam pelaksanaan suatu aturan dan kebijakan. Pelaksanaan Monitoring kepatuhan jam kerja bersifat rutin yang berdekatan dengan perayaan hari besar keagamaan atau bersifat insidental berdasarkan indikasi tertentu dan bersifat insidental atas instruksi Walikota atau laporan yang masuk.

Tabel II.11.1 Jumlah dan Hasil Pelaksanaan Monitoring kepatuhan jam kerja Tahun 2017 -2019

Tahun	2017	2018*)	2019
Jumlah Monitoring	4	4	2
Hasil Monitoring : Prosentase ketidakhadiran tanpa keterangan	0,03 %	0,3 %	0,19

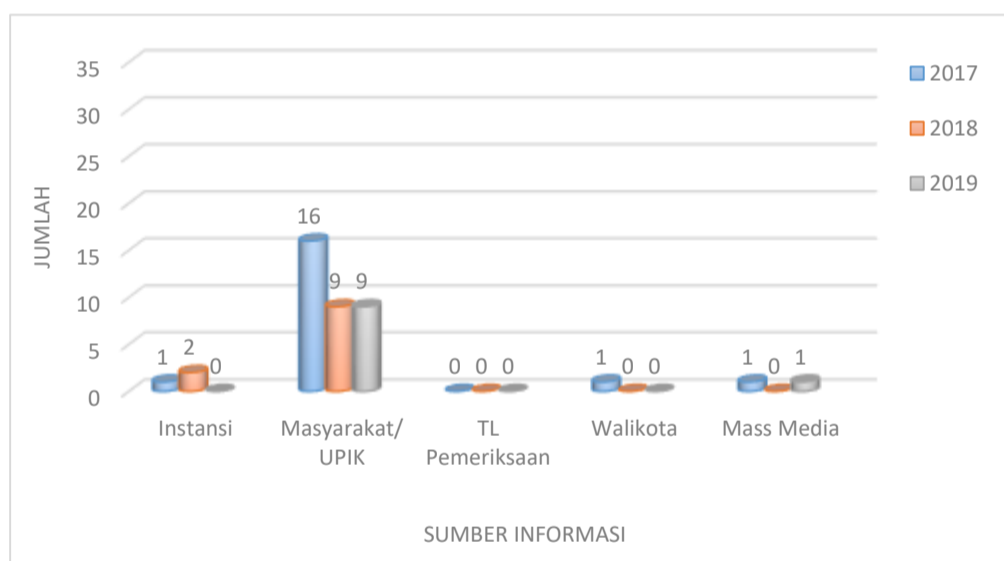
*)Dengan sample 51 OPD (5.393 pegawai)

II.12 Penelitian dan Penelaahan Informasi

Penelitian dan penelaahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti aduan, informasi dan atau laporan yang diterima Inspektorat sehingga akan diketahui apakah dari informasi tersebut benar terjadi penyimpangan dan pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab. Hasil penelitian dan penelaahan informasi menyimpulkan perlu tidaknya langkah pengawasan selanjutnya atas informasi tersebut, yang berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tabel II.12.1 Sumber Informasi Tahun 2017 -2019

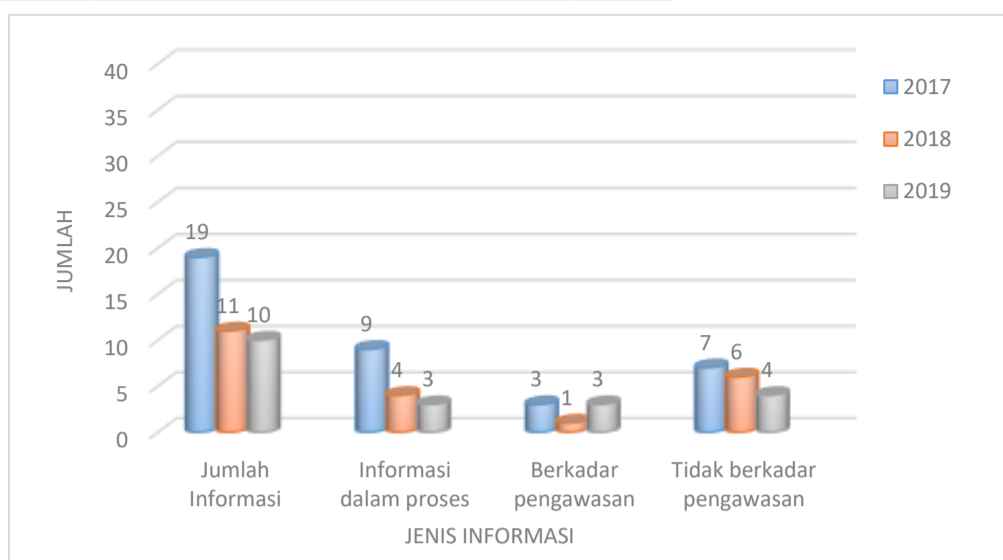
No.	Sumber Informasi	2017	2018	2019
1.	Permintaan/Laporan Instansi	1	2	0
2.	Aduan dari masyarakat/ UPIK	16	9	9
3.	Pengembangan pemeriksaan reguler/ Hasil Inspeksi	0	0	0
4.	Perintah langsung Walikota	1	0	0
5.	Mass Media	1	0	1
	Jumlah	19	11	10



Grafik II.12.1 Sumber Informasi Tahun 2017 -2019

Tabel II.12.2 Jenis Informasi Tahun 2017 -2019

No.	Jenis Informasi	2017	2018	2019
1.	Jumlah informasi masuk	19	11	10
2.	Jumlah informasi dalam proses	9	4	3
3.	Jumlah informasi yang selesai diteliti dan ditelaah Berkadar pengawasan	3	1	3
4.	Jumlah informasi yang selesai diteliti dan ditelaah tidak berkadar pengawasan	7	6	4



Grafik II.12.2 Jenis Informasi Tahun 2017 -2019

II. 13 Pengawasan Lainnya

a. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Th 2012-2025
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Dalam kegiatan Monev PPK terdapat 3 sub kegiatan yaitu monev pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) , pendampingan dan penilaian OPD percontohan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta pengendalian gratifikasi.

Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tanggal 20 Juli 2018

No	Uraian RAD PPK	Tahun 2019		
		Target %	Bobot	Realisasi %
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	20	100
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	100	15	88
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	15	79
4.	Kapabilitas APIP	100	15	60
5.	Manajemen ASN	100	15	97
6.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	100	15	100
7.	Manajemen Aset Daerah	100	5	77
	Nilai Akumulatif		100	86

1) Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Untuk pendampingan dan penilaian ZI WBK-WBBM Tahun 2019 dilaksanakan pada 8 OPD percontohan. Pendampingan dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019, kemudian atas hasil penilaian TPI 8 OPD diantaranya disampaikan ke kementerian PAN dan RB untuk divalidasi.

Tahun 2019 ini hasil validasi Kemenpan & RB atas terdapat 2 OPD yang memperoleh predikat WBK dan belum terdapat OPD yang naik tingkat dari predikat WBK ke WBBM.

Tabel II.13.a.2) Penilaian Zona Integritas 201-2019

No	SKPD Percontohan	Hasil Penilaian Internal			Validasi Kemenpan dan RB		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Dinas Perizinan	88,97	93,13	87,24	-	93,13	
2	UPT Pusat Bisnis	89,79	-	76,12	-	-	
4	Dinas Kesehatan	77,88	92,30	88,42	-	92,30	
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	55,36	-	84,62	-	-	
6	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	83,24	80,61	87,24	-	80,61	77,58
6	Kelurahan Prawirodirjan	62,39	-	87,24	-	-	
8	Puskesmas Mantrijeron	72,49	-	87,24	-	-	77,45

*) Tahun 2017, tidak melakukan penilaian ke Kementerian PAN dan RB

2) Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kota Yogyakarta telah dirintis sejak Tahun 2013 dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sosialisasi pengendalian gratifikasi juga telah dilakukan sejak Tahun 2014 hingga saat ini bersamaan dengan sosialisasi anti korupsi di berbagai kesempatan yang ada, Tahun 2016 sosialisasi dilaksanakan untuk stake holder eksternal antara lain Komite Sekolah dari tingkat TK sampai SMA/SMK, LPMK dan PKK Kecamatan. Tahun 2017 melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi yang didalamnya ada Pengendalian Gratifikasi berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah. Pada Tahun 2018 dilakukan sosialisasi Revisi Perwal Gratifikasi Nomor 113 Tahun 2017 pada saat Gelar Pengawasan Daerah. Pada Tahun 2019 dilakukan pemberitahuan terkait gratifikasi terhadap keseluruhan OPD melalui surat edaran Walikota pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Stop jasa Avalis

Tabel II.13.a.3) Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2017 -2019

Tahun	SKPD /BUMD Wajib Lapo	Peristiwa Gratifikasi bentuk uang		Peristiwa Gratifikasi bentuk barang	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Perkiraan Nilai (Rp)
2017	51	1	2.000.000	3	2.910.000
2018	51	0	0	0	300.000
2019	51	0	0	8	800.000

b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pelaksanaan PMPRB didasarkan pada Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berikut adalah hasil PMPRB Pemerintah Kota Yogyakarta :

Tabel II.13.b Hasil PMPRB On Line Tahun 2017-2019

No.	Indikator	2017	2018	2019
A.	Proses	54,41	58,46	59,17
I.	Manajemen Perubahan	5	5	5
II.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,71	5	5
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	6	6
IV.	Penataan Tatalaksana	4,88	4,88	4,86
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	14,14	14,49	15
VI.	Penguatan Akuntabilitas	5,74	5,74	6
VII.	Penguatan Pengawasan	10,28	11,42	11,31
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,67	5,93	6
B.	HASIL	29,58	29,84	30,89
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	14,04	14,27	14,7
II.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	7,59	7,59	8,09
III.	Kualitas Pelayanan Publik	7,95	7,98	8,1
	Indeks RB (Total)	83,99	88,3	90,06

c. Pengendalian Intern Pemerintah

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun SPIP dengan mengacu Surat Edaran Mendagri No. 120/2356/SJ tentang Penyelenggaraan SPIP dan sudah terbit Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP, Pembentukan Satgas tingkat Pemerintah Kota yang dikoordinir Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Yogyakarta berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Alokasi anggaran SPIP berada di Inspektorat Kota Yogyakarta untuk berbagai kegiatan yaitu :

Peraturan-peraturan terkait SPIP mulai tahun 2010 sampai dengan 2011 yaitu:

Tabel II.13.c.1) Tahap Penyusunan Peraturan SPIP

No.	Tahun	Peraturan	Isi
1	2010	Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010	Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta
2	2010	Keputusan Walikota Nomor 554/KEP/Tahun 2010	Pembentukan Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta
3	2011	Keputusan Walikota Nomor 482 Tahun 2011	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
4	2011	Surat Edaran Sekda Nomor	Penyelenggaraan SPIP

	130/35/SE/2011 tanggal 6 Juni 2011	
--	------------------------------------	--

Penyelenggaraan Diklat SPIP telah dilaksanakan mulai tahun 2010 sampai dengan 201 dengan jumlah personil 104 orang.

Tabel II.13.c.2) Jumlah Personil mengikuti Diklat/Workshop SPIP

Angkatan	Tahun	Jumlah
I – III	2010	40 orang
IV – V	2011	10 orang
VI	2012	5 orang
VII	2013	2 orang
VIII	2014	47 orang
-	2015	-
-	2016	-
-	2017	-
-	2018	-
-	2019	-
Jumlah		104 orang

Pada tahap pemahaman, Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan Sosialisasi ke seluruh SKPD/Unit Kerja

Tabel II.13.c.3) Tahap Pemahaman SPIP

No.	Peserta sosialisasi	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Auditor Inspektorat dan seluruh Kepala SKPD/unit kerja	79 orang	Tahun 2009
2	Seluruh Kepala SKPD/unit kerja	49 orang	Tahun 2011
3	45 SKPD dan 18 Puskesmas di Pemerintah Kota Yogyakarta	2.500 orang	Tahun 2012

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang SPIP telah diselenggarakan workshop bagi satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD.

Tabel II.13.c.4) Penyelenggaraan Workshop SPIP

No.	Kegiatan	Peserta Workshop	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop Pemetaan	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta	25 orang	Tahun 2011
2	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop <i>Diagnostic Assesment</i> dan Penilaian Risiko • Workshop Pemetaan 	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan Satgas SPIP SKPD	73 orang	Tahun 2012

	untuk Satgas SPIP SKPD			
3	Workshop Pemetaan SPIP berbasis penilaian resiko	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan 6 (enam) SKPD sampel	35 orang	Tahun 2013
4	Workshop Evaluasi Terpisah	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan PFA Inspektorat Kota Yogyakarta	40 orang	Tahun 2014
5	Workshop Penyusunan RTP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan PFA Inspektorat Kota Yogyakarta	40 orang	Tahun 2015
	Lokakarya Nasional Maturitas SPIP	APIP se DIY Jateng dan Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD	150 orang	Tahun 2015
7	Overview SPIP dan Pengenalan Form Penilaian Risiko	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD	100 orang	Tahun 2018
8	Workshop Penyusunan RTP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/OPD	100 orang	Tahun 2019
9	Workshop Maturitas SPIP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/OPD	180 orang	Tahun 2019

Monitoring penerapan SPIP telah dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun yaitu:

Tabel II.13.c.5) Monitoring SPIP

No.	Tahun	SKPD	Periode
1	2012	25	Juli, Agustus, September dan Desember
2	2013	40	Juli, Oktober, Nopember dan Desember
3	2014	49	Oktober, November dan Desember
4	2015	53	Juni, Agustus, Oktober dan Desember
5	2016	51	Juli, September, Oktober dan Nopember
6	2017	54	April, Juli, September dan Desember
7	2018	54	April, Juli, September dan Desember
8	2019	51	Reviu RTP periode Juli dan Workshop Maturitas SPIP periode November

Pada Tahun 2019 dilakukan Review Rencana Tindak Pengendalian pada bulan September dengan obyek 8 SKPD.



Gbr. Pertemuan Pembinaan Pengawasan dengan Wakil Walikota

d. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan kegiatan menginventarisir data-data temuan beserta tindak lanjutnya baik internal maupun eksternal dengan dilakukan monitoring maupun koordinasi dengan mitra kerja dimana Inspektorat sebagai koordinator tindak lanjut pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil Inventarisasi hasil pemeriksaan tersebut kemudian digelar dalam acara Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diselenggarakan dalam rangka memasyarakatkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan, serta upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Upaya mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan juga dilakukan dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan seluruh SKPD/unit kerja.

Gb. II.13.1 Gelar Pengawasan Daerah



Gb. II.13.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

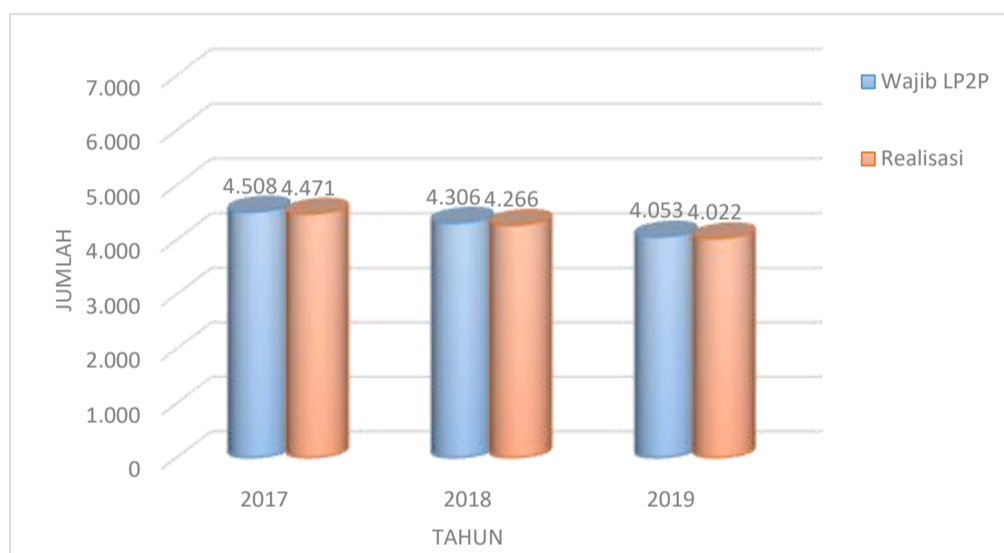


e. Penelitian LP2P

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah maka Inspektorat Kota Yogyakarta ditunjuk untuk melaksanakan Penelitian LP2P terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel II.13.e Penelitian LP2P Tahun 2017 -2019

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Wajib LP2P	Realisasi	Wajib LP2P	Realisasi	Wajib LP2P	Realisasi
Gol III/a	644	637	580	580	530	518
Gol III/b ke atas	3.864	3.834	3.726	3.686	3.523	3.504
Jumlah	4.508	4.471	4.306	4.266	4.053	4.022



Grafik II.13.e Penelitian LP2P Tahun 2017 – 2019

f. Klinik Konsultasi

Dalam rangka mengimplementasikan peran APIP yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Yogyakarta telah membuka klinik konsultasi sejak pertengahan tahun 2015 dan disosialisasikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui klinik konsultasi, Inspektorat berupaya untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan. Klinik konsultasi ini sekaligus sebagai inovasi karena diharapkan SKPD yang semula sebagai obyek pengawasan menjadi proaktif sebagai subyek pengawasan dengan melakukan konsultasi kepada Inspektorat Kota Yogyakarta tanpa harus menunggu jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Tabel II.13.f Jumlah Pemakai Layanan Klinik Konsultasi Pengawasan Tahun 2017 - 2019

No	Tahun	Jumlah Pemakai
1.	2017	28 (dua puluh delapan)
2.	2018	26 (dua puluh enam)
3.	2019	25 (dua puluh lima)

g. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Yogyakarta

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 511 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan kemudian dikukuhkan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2016. Satuan Tugas Saber Pungli melibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Polres Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Kodim 0734, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Satgas Saber Pungli diketuai oleh Wakil Kepala Polres Kota Yogyakarta dan anggota satgas tersebar di empat kelompok kerja (Pokja Unit Intelijen, Pokja Unit Pencegahan, Pokja Unit Penindakan, dan Pokja Unit Yustisi). Selama tahun 2019, Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta telah melaksanakan Sosialisasi Saber Pungli sebanyak 303 kali, melaksanakan koordinasi sebanyak 12 kali dan 12 laporan yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tindak lanjut hasil audit merupakan kewajiban Perangkat Daerah yang diperiksa. Tindak lanjut tersebut divalidasi oleh Auditor untuk dinyatakan suatu temuan sudah selesai ditindaklanjuti.

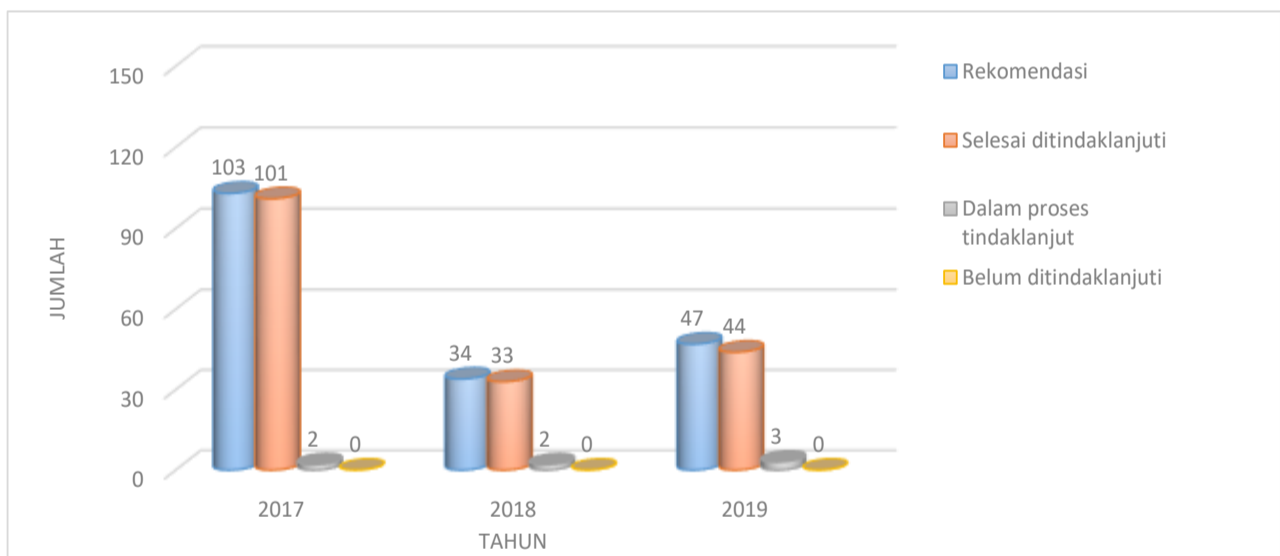
Inspektorat Kota Yogyakarta selain menginventarisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta sendiri juga menginventarisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya dan pemeriksaan BPK-RI sebagai bahan pemutakhiran data yang diadakan pemeriksa bersangkutan.

III.1 Tindak Lanjut Audit Operasional

Tindak lanjut hasil Audit Operasional dilaksanakan oleh SKPD yang diperiksa. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat.

Tabel III.1.1 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Tahun 2017 -2019

Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dlm Proses	Belum
2017	103	101	2	0
2018	34	33	1	0
2019	47	44	3	0

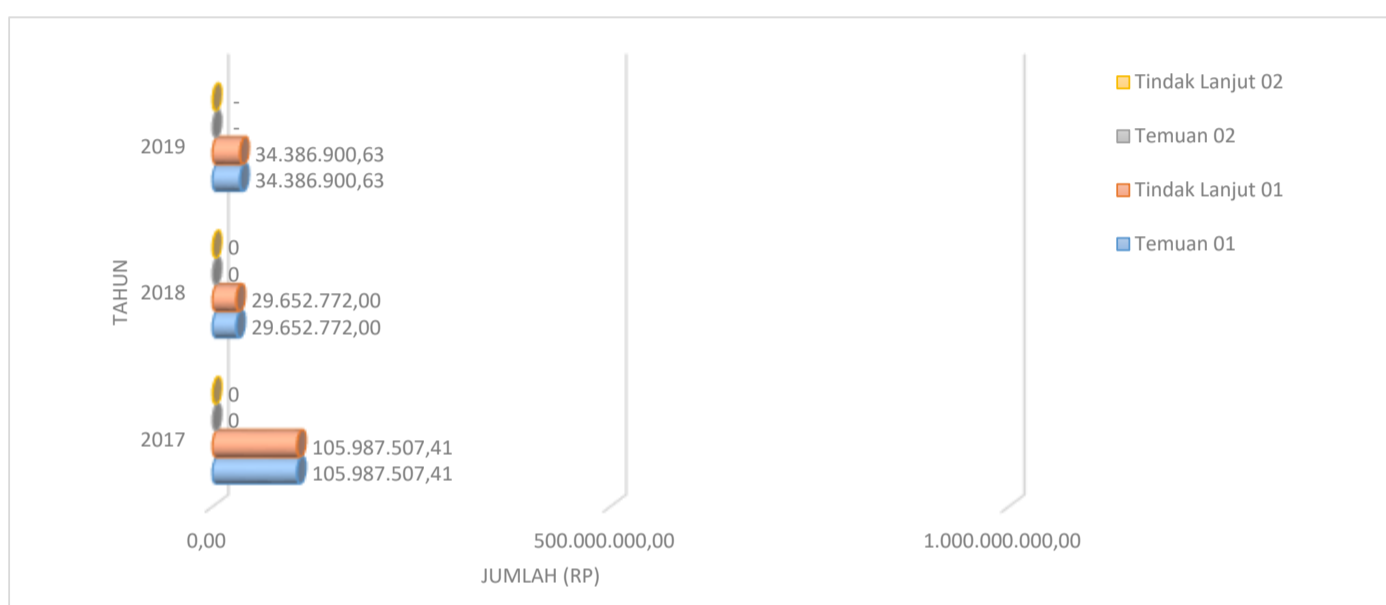


Grafik III.1.1 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Tahun 2017 -2019

Tabel III.1.2 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Bersifat Finansial/
Dapat Dinilai Uang Tahun 2017 - 2019

Tahun	Kerugian Negara/Daerah (01) Rp		Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah (02) Rp	
	Temuan	Tindak Lanjut	Temuan	Tindak Lanjut
2017	105.987.507,41	105.987.507,41	-	-
2018	29.652.772,00	29.652.772,00	-	-
2019	34.386.900,63	34.386.900,63	-	-

Tabel III.1.2 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Bersifat Finansial/
Dapat Dinilai Uang Tahun 2017 - 2019



Grafik III.1.2 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Bersifat Finansial/
Dapat Dinilai Uang Tahun 2017 -2019

III.2 Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu

a. ADTT Tematik

Tindak lanjut Audit Dengan Tujuan Tertentu berupa pengembalian kerugian daerah atau kekurangan kewajiban setor ke Kas Daerah dan tindak lanjut administratif.

Tabel III.2.a.1) Tindak lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017-2019

Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dalam Proses	Belum
2017	9	9	0	0
2018	46	46	0	0
2019	24	23	1	0

Tabel III.2.a.2) Tindak Lanjut

Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017 -2019

Tahun	Kerugian Negara/ Daerah (01) Rp		Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah (02) Rp	
	Temuan	Tindak Lanjut	Temuan	Tindak Lanjut
2017	3,929,218.00	3,929,218.00	-	-
2018	131.050.880,00	131.050.880,00	-	-
2019	245.483.700,00	245.483.700,00	-	-

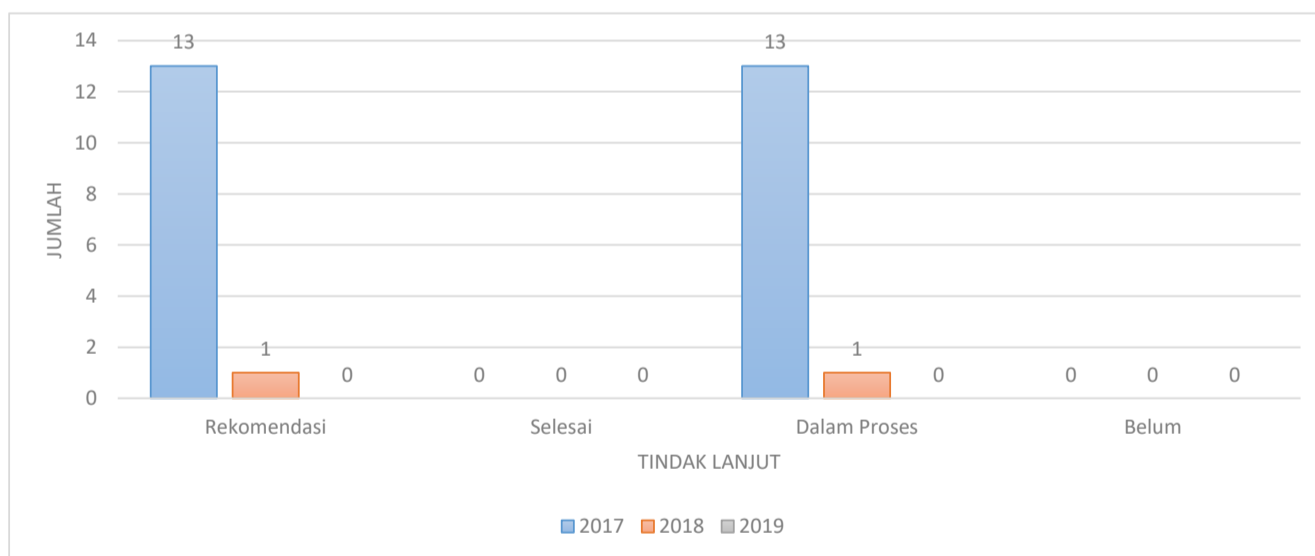
b. ADTT Kasus

Tindak lanjut Audit Dengan Tujuan Tertentu Kasus dari Inspektorat antara lain penjatuhan hukuman disiplin pada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dan berupa pengembalian kerugian daerah atau kekurangan kewajiban setor ke Kas Daerah.

Tabel III.2.b.1) Tindak Lanjut Hasil ADTT Kasus Tahun 2017 -2019

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dalam Proses	Belum
2017*)	13	0	13	0
2018	1	0	1	0
2019	0	0	0	0

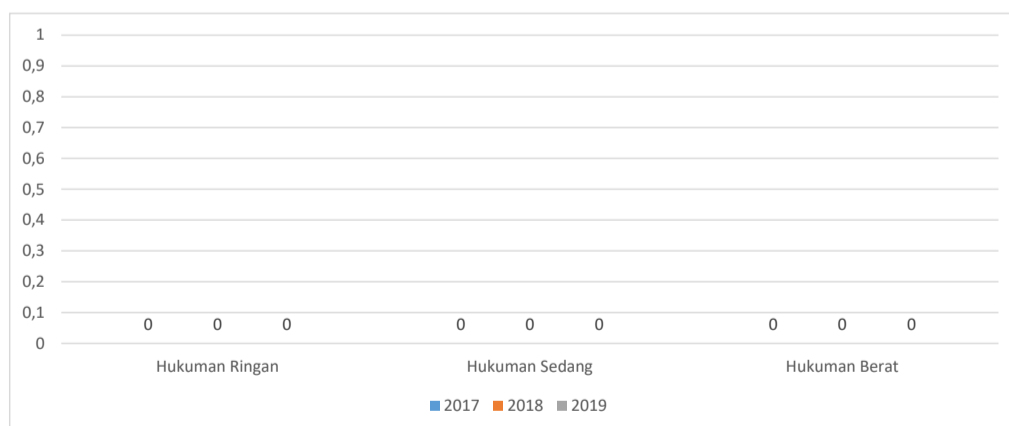
*) Pemeriksaan Khusus



Grafik III.2.b.1) Tindak Lanjut Hasil ADTT Kasus Tahun 2017 -2019

Tabel III.2.b.2) Tindak Lanjut Berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin
Tahun 2017 - 2019

No	Hukuman disiplin	Tahun		
		2017	2018	2019
A	Hukuman Ringan	0	0	0
1	Tegoran lisan	0	0	0
2	Tegoran tertulis	0	0	0
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0	0	0
B	Hukuman Sedang	0	0	0
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun	0	0	0
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	0	0	0
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	0	0	0
C	Hukuman Berat	0	0	0
1	Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) tahun	0	0	0
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0
3	Pembebasan jabatan	0	0	0
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	0	0
5	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	0	0
	Total	0	0	0



Grafik III.2.b.2) Tindak Lanjut Berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2017 -2019